



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2019**

**DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**

**JL. S.M AMIN No. 92 Pekanbaru**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika	3
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
2.3	Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3.	Program dan Kegiatan	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V	PENUTUP	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau s/d Tahun 2017	6
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	16
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Riau	20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Riau	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019	36
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Provinsi Riau	39
Tabel 3.3	Program Prioritas Sesuai Target RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019	41
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Riau	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansial adalah penerjemah dari visi, misi dan program Perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tahapan dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah tersebut di atur sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 yang melalui beberapa tahapan, yaitu : Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rancangan Akhir Renja ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2019-2024.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2019, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Provinsi Riau;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan akhir Renja ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Adapun berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA**

Rancangan akhir Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Dinas PUPRPKPP PROV. RIAU

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program strategis pada Tahun 2019 yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Evaluasi Hasil Pelaksanaan merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 2.1 (T-C.29.)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**  
**S/D Tahun 2018**

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
0			Non Urusan																								
0			NON URUSAN																								
1	0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik																								
	00 00 001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	24,00 Bulan	2.040.000.000	0	0	12	1.020.000.000	3	0	3	0	3	99.000.000	3	259.320.000	12	358.320.000	100,00	35,13	12	358.320.000	50	17,56		Hanya Jasa Komunikasi yang disediakan (air dan listrik belum disediakan karena belum pindah ke gdg. Baru)
	00 00 001	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	24,00 Bulan	681.200.000	0	0	12	331.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		Belum dapat direalisasikan karena masih belum pindah ke Gedung
	00 00 001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	36,00 Bulan	747.000.000	12	230.395.500	12	162.620.900	3	0	3	0	3	156.736.000	3	670.000	12	157.406.000	100,00	96,79	24	387.801.500	66,67	51,91		
	00 00 001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,00 Bulan	426.407.600	12	158.744.000	12	112.227.600	3	0	3	0	3	106.483.850	3	972.000	12	107.455.850	100,00	95,75	24	266.199.850	66,67	62,43		
	00 00 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	24,00 Bulan	147.617.000	0	0	12	47.617.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		Belum dapat direalisasikan karena masih belum pindah ke Gedung
	00 00 001	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	285,00 Unit	1.511.500.000	0	0	22	200.000.000	0	0	17	0	0	0	0	103.486.685	17	103.486.685	77,27	51,74	17	103.486.685	5,96	6,85		
	00 00 001	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang disediakan	11.220,00 Porsi	289.000.000	1.803	55.616.800	3.180	79.000.000	731	0	541	13.500.000	0	11.625.000	1.908	22.750.000	3.180	47.875.000	100,00	60,60	4.983	103.491.800	44,41	35,81		
	00 00 001	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang	321,00 Kali	1.733.591.000	23	1.807.317.324	32	401.230.000	15	0	17	300.883.100	0	58.166.300	0	1.050.000	32	360.099.400	100,00	89,75	55	2.167.416.724	45,45	125,02		
	00 00 001	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa keamanan Kantor yang di Sediakan	14,00 Orang	407.400.000	0	0	7	205.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		Belum dapat direalisasikan karena masih belum pindah ke Gedung
	00 00 001	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Exspo) yang di ikuti	2,00 Pameran	146.875.000	0	0	1	96.875.100	0	0	0	0	0	0	1	72.400.000	1	72.400.000	100,00	74,74	1	72.400.000	50	49,29		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			67,73	50,45			32,92	34,89			
Predikat Kinerja																			Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=9+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100		16	17																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
2	0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur																																												
	0.00	00	002	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang	59,00	Unit	1.167.735.000	13	395.123.802	21	306.345.700	0	0	5	126.280.000	0	6.000.000	8	142.386.350	13	274.666.350	61,90	89,66	26	669.790.152	44,07	57,36																					
	0.00	00	002	043 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang di Rehab	750,00	M	1.000.000.000	0	0	750	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		Belum dapat direalisasikan karena masih belum pindah ke Gedung																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				30,95	44,83			22,04	28,68																								
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																								
3	0	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur																																												
	0.00	00	003	000 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang waktu Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	36,00	Bulan	267.500.000	12	44.900.000	12	57.500.000	3	0	3	10.950.000	3	10.875.000	3	6.300.000	12	28.125.000	100,00	48,91	24	73.025.000	66,67	27,30																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	48,91			66,67	27,3																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah																								
4	0	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan																																												
	0.00	00	006	000 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Teknis Bidang	4,00	Dokumen	833.562.000	2	294.135.800	1	249.199.600	0	0	0	0	0	0	1	49.600.000	1	49.600.000	100,00	19,90	3	343.735.800	75	41,24		Rasionalisasi Anggaran di RKPDP Perubahan (Pagu Dana Turun)																			
	0.00	00	006	093 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas perumahan,	0	Dokumen	771.796.400	0	0	1	240.190.100	0	0	0	92.244.700	0	59.537.500	1	51.200.400	1	202.982.600	100,00	84,51	1	202.982.600	0	26,30																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	52,21			37,5	33,77																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																								

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17					
1.01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																													
1.01	3		PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG																													
5	1.01	3	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cipta Tumbuh	Jumlah Kawasan Strategis Yang Ditingkatkan Infrastrukturnya																											
	1.01	03	29	019 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	6,00	Dokumen	2.565.770.800	0	0	3	1.037.976.800	0	0	0	0	17.092.300	0	5.100.000	3	749.283.500	3	771.475.800	100,00	74,32	3	771.475.800	50	30,07			
	1.01	03	29	020 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi di Selat Panjang yang	Jumlah Kawasan Strategis Selat Panjang yang	2,00	Kawasan	6.246.435.000	0	0	1	2.746.435.300	0	0	0	0	14.301.400	0	486.441.900	1	1.762.020.500	1	2.262.763.800	100,00	82,39	1	2.262.763.800	50	36,22			
	1.01	03	29	021 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Rupa yang	Jumlah Kawasan Strategis Pulau Rupa yang	1,00	Kawasan	3.762.535.300	0	0	1	4.925.035.300	0	0	0	0	15.396.200	0	61.163.600	0	4.800.000	0	81.359.800	0,00	1,65	0	81.359.800	0	2,16		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)	
	1.01	03	29	025 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kawasan Cipta Tumbuh di Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan Strategis Cipta Tumbuh Kabupaten Kampar	1,00	kawasan	973.400.000	0	0	1	973.400.000	0	0	0	0	12.476.000	0	57.679.200	0	6.800.000	0	76.955.200	0,00	7,91	0	76.955.200	0	7,91		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)	
	1.01	03	29	029 Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum	Jumlah Lokasi yang di Tetapkan Provinsi Riau	6,00	Lokasi	799.404.000	0	0	3	881.792.800	0	0	0	51.594.700	0	140.202.300	0	103.498.131	3	92.057.500	1	387.352.631	33,33	43,93	1	387.352.631	16,67	48,46		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun), realisasi hanya 1 dok
	1.01	03	29	034 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi di Duri-Dumai-Rupat	Jumlah Kawasan Strategis Duri-Dumai-Rupat Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastrukturnya Permukimannya	2,00	Kawasan	57.032.150.000	0	0	1	26.832.150.000	0	0	0	0	193.002.200	0	947.587.800	1	6.571.158.700	1	7.711.748.700	100,00	28,74	1	7.711.748.700	50	13,52		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun), substansi yang dikerjakan berkurang	
	1.01	03	29	035 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kota Dumai	Jumlah Kawasan Kumuh di Dumai yang di Tingkatkan	2,00	Kawasan	8.269.431.800	0	0	1	4.414.245.300	0	0	0	0	12.775.700	0	3.600.000	0	54.092.000	0	70.467.700	0,00	1,60	0	70.467.700	0	0,85		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)	
	1.01	03	29	036 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak yang di	2,00	Kawasan	5.471.634.000	0	0	1	1.971.634.300	0	0	0	0	12.138.000	0	3.600.000	0	54.300.000	0	70.038.000	0,00	3,55	0	70.038.000	0	1,28		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)	
	1.01	03	29	037 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Yang	2,00	Kawasan	5.481.714.000	0	0	1	1.981.714.300	0	0	0	0	15.815.966	0	3.600.000	0	54.657.000	0	74.072.966	0,00	3,74	0	74.072.966	0	1,35		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)	
	1.01	03	29	038 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar Yang	2,00	Kawasan	5.254.404.000	0	0	1	1.754.404.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		RASIONALISASI, TIDAK DILAKSANAKAN	
	1.01	03	29	039 Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan	9,00	Dokumen	1.779.611.300	0	0	4	707.334.300	0	0	0	0	26.677.100	0	8.700.000	4	443.764.625	4	479.141.725	100,00	67,74	4	479.141.725	44,44	26,92			
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		39,39	28,69			19,19	15,34						
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14 = 6+12		15 = 14/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
6	1.01	3	32	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman perkotaan																									
	1.01	03	32	082 Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	24,00	Dokumen	3.633.383.500	0	0	12	1.460.056.300	0	0	0	21.994.150	0	25.017.500	12	1.168.957.500	12	1.215.969.150	100,00	83,28	12	1.215.969.150	50	33,47		
	1.01	03	32	083 Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman	2,00	Dokumen	416.558.000	0	0	1	387.873.600	0	0	0	6.000.000	0	3.600.000	1	31.189.500	1	40.789.500	100,00	10,52	1	40.789.500	50	9,79		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	084 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Pekanbaru	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Pekanbaru	13.257,0	Meter	6.100.000.000	0	0	12.500	18.721.754.300	0	0	0	88.292.000	0	84.111.750	0	273.112.000	0	445.515.750	0,00	2,38	0	445.515.750	0	7,30		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)
	1.01	03	32	085 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Dumai	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Dumai Yang	5.233,0	Meter	6.100.000.000	0	0	4.530	801.124.300	0	0	0	199.144.800	0	12.330.000	0	11.600.000	0	223.074.800	0,00	27,85	0	223.074.800	0	3,66		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)
	1.01	03	32	086 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Rokan	17.158,0	Meter	18.939.000.000	0	0	16.456	24.416.384.300	0	0	0	227.957.900	1,474	411.917.650	1,202	2.414.340.816	2,676	3.054.216.366	16,26	12,51	2,676	3.054.216.366	15,60	16,13		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	087 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	1.901,0	Meter	2.576.124.000	0	0	1.300	1.476.124.300	0	0	0	76.981.700	0	6.300.000	0	6.800.000	0	90.081.700	0,00	6,10	0	90.081.700	0	3,50		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)
	1.01	03	32	088 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Bengkalis	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	7.938,0	Meter	9.139.724.300	0	0	7.336	5.339.724.300	0	0	0	215.568.800	0	107.069.000	1,200	1.075.059.926	1,200	1.397.697.726	16,36	26,18	1,200	1.397.697.726	15,12	15,29		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	089 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Siak	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Siak	6.205,0	Meter	7.122.254.328	0	0	5.500	5.022.254.328	0	0	0	142.325.600	0	12.115.000	1,600	1.430.367.000	1,600	1.584.807.600	29,09	31,56	1,600	1.584.807.600	25,79	22,25		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	090 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Pelalawan	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	3.905,0	Meter	4.700.000.000	0	0	3.200	10.078.784.300	0	0	0	106.023.900	1,353	310.802.900	1,177	2.193.778.700	2,530	2.610.605.500	79,06	25,90	2,530	2.610.605.500	64,79	55,54		
	1.01	03	32	091 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	2.304,0	Meter	2.865.724.000	0	0	1.600	1.765.724.300	0	0	0	6.310.500	0	53.716.000	0	4.800.000	0	64.826.500	0,00	3,67	0	64.826.500	0	2,26		Terkena Rasionalisasi Anggaran (realisasi hanya dok perencanaan)
	1.01	03	32	092 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	1.702,0	Meter	2.300.000.000	0	0	1.000	5.933.633.300	0	0	0	24.030.000	1,000	271.341.141	0	581.019.128	1,000	876.390.269	100,00	14,77	1,000	876.390.269	58,75	38,10		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	093 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten	16.349,0	Meter	18.200.000.000	0	0	15.725	27.358.644.300	0	0	0	53.197.500	750	358.056.600	0	897.976.000	750	1.309.230.100	4,77	4,79	750	1.309.230.100	4,59	7,19		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	094 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kampar	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Kampar	1.355,0	Meter	1.871.124.300	0	0	650	14.049.124.300	0	0	0	35.633.900	650	8.132.300	0	574.845.947	650	618.612.147	100,00	4,40	650	618.612.147	47,97	33,06		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
	1.01	03	32	095 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Rokan	5.957,0	Meter	6.974.724.300	0	0	5.255	8.174.724.300	0	0	0	43.424.600	625	222.154.350	0	559.961.743	625	825.540.693	11,89	10,10	625	825.540.693	10,49	11,84		Rasionalisasi Anggaran di RKPD Perubahan (Pagu Dana Turun)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																39,82	18,86			24,51	18,53									
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1.01	4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN																											
7	1.01	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah sarana perumahan kawasan permukiman strategis																									
	1.01	04	15	034 Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau	Jumlah Laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak	2,00	Dokumen	3.848.285.000	0	0	1	1.279.355.000	0	0	0	997.200	0	0	1	1.098.816.000	1	1.099.813.200	100,00	85,97	1	1.099.813.200	50	28,58		
	1.01	04	15	036 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1 yang di Bangun	1.045,0	Unit	57.492.000.000	0	0	545	26.800.000.000	0	0	0	2.178.000.000	0	12.056.000.000	535	15.191.000.000	535	29.425.000.000	98,17	109,79	535	29.425.000.000	51,20	51,18		Kegiatan Prioritas Daerah . Dana disesuaikan karena ada kenaikan biaya pembangunan rumah. Target unit menurun pada RKPD Perubahan, dikarenakan ada pembatalan unit karena nama penerima yang sama atau calon penerima sudah meninggal dll
	1.01	04	15	037 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2 yang dibangun	1.000	Unit	57.500.000.000	0	0	500	25.750.000.000	0	0	0	4.255.000.000	0	7.153.000.000	495	17.077.500.000	495	28.485.500.000	99,00	110,62	495	28.485.500.000	49,50	50		
	1.01	04	15	038 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3 yang di Bangun	1.016,0	Unit	61.000.000.000	0	0	516	26.750.000.000	0	0	0	8.592.000.000	0	7.224.000.000	512	14.904.000.000	512	30.720.000.000	99,22	114,84	512	30.720.000.000	50,39	50,36		
	1.01	04	15	039 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4 yang Dibangun	1.000	Unit	60.000.000.000	0	0	500	28.250.000.000	0	0	0	9.792.000.000	0	7.206.000.000	484	12.042.000.000	484	29.040.000.000	96,80	102,80	484	29.040.000.000	48,40	48		
	1.01	04	15	040 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 1	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)	2,00	Dokumen	1.589.153.200	0	0	1	1.105.729.000	0	0	0	143.687.200	0	15.120.800	1	310.194.000	1	469.002.000	100,00	42,42	1	469.002.000	50	29,51		
	1.01	04	15	041 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 2	Jumlah Laporan Manajemen Pembangunan Rumah Sehat	2,00	Dokumen	1.737.240.000	0	0	1	1.160.364.000	0	0	0	83.350.200	0	25.983.300	1	296.658.150	1	405.991.650	100,00	34,99	1	405.991.650	50	23,37		Hanya dibayarkan 85% karena ada urusan administrasi yang tidak dapat/belum dilaksanakan
	1.01	04	15	042 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 3	Jumlah Laporan Manajemen Pembangunan Rumah Sehat	2,00	Dokumen	1.879.422.000	0	0	1	1.205.624.000	0	0	0	93.959.900	0	55.889.900	1	392.781.500	1	542.631.300	100,00	45,01	1	542.631.300	50	28,87		
	1.01	04	15	043 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 4	Jumlah Laporan Manajemen Pembangunan Rumah Sehat	2,00	Dokumen	1.845.098.000	0	0	1	1.171.444.000	0	0	0	84.289.100	0	63.393.200	1	283.686.250	1	431.368.550	100,00	36,82	1	431.368.550	50	23,38		
	1.01	04	15	045 Pengelolaan Rusunawa Pekerjaan Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja Provinsi Riau yang dikelola	2,00	Rusunawa	4.470.000.000	0	0	1	1.082.810.000	0	0	0	805.666.170	0	1.565.532.597	1	331.132.611	1	2.702.331.378	100,00	249,57	1	2.702.331.378	50	60,45		Kegiatan Prioritas Daerah. Rusunawa akan dijadikan embarkasi haji. Dana dinaikkan sesuai dengan kebutuhan di RKPD 2018
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			99,32	93,28			49,95	39,36						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7)																			68,17	48,18			36,11	28,27						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7)																			Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :-																														
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya :-																														
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya :-																														

Dalam pelaksanaan seluruh urusan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang terdiri dari 7 Program dan 50 Kegiatan, dialokasikan dana sebesar Rp.261.852.980.728,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.151.426.789.086,- (57,83%) dan realisasi fisik 64,88 %. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Non Urusan dengan dana sebesar Rp. 3.640.046.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.762.416.885,- (48,41%) dan realisasi fisik 78,30 %
2. Urusan Pekerjaan Umum dengan dana sebesar Rp. 130.383.907.028,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.342.734.123,- (20,20%) dan realisasi fisik 41,11 %
3. Urusan Perumahan dengan dana sebesar Rp. 127.828.609.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 123.298.739.771,- (96,47%) dan realisasi fisik 98,08%

Realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sangat rendah dikarenakan adanya rasionalisasi kegiatan tahun 2018 sesuai dengan pakta integritas, sehingga harus dilakukan perubahan pada APBD Perubahan 2018 untuk menyesuaikan dengan dinamika keadaan. Untuk pelaksanaan rencana kerja tahun berikutnya maka diperlukan pemantapan dalam proses perencanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang serta melakukan kajian untuk melakukan restrukturisasi dan penambahan personil yang sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menghitung capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja yang merupakan rumusan tolak ukur kinerja Perangkat Daerah yang menjelaskan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut dengan efektif dan efisien.

Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3
1.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan SPAM Permukiman	Cakupan Layanan SPAM Permukiman	9.000 Jiwa	12.000 Jiwa	12.000 Jiwa
			Meningkatnya Cakupan Layanan Drainase Lingkungan Permukiman	Cakupan Permukiman Yang Dibangun/ Ditingkatkan Drainase Lingkungannya	12 Permukiman	24 Permukiman	24 Permukiman
			Meningkatnya Cakupan Layanan SPAL Permukiman	Cakupan Layanan SPAL Permukiman	2 Permukiman	3 Permukiman	3 Permukiman

			Meningkatnya Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Permukiman	Cakupan Permukiman Yang Dibangun/ Ditingkatkan Jalan Lingkungannya	12 Permukiman	24 Permukiman	36 Permukiman
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi yang Ditingkatkan Layanan Infrastrukturnya	2 Permukiman	5 Permukiman	5 Permukiman
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	156.11 Ha	99.85 Ha	53.02 Ha



2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing.	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Provinsi Riau	Persentase Penurunan RTLH Di Provinsi Riau	54.34 %	49.93 %	45.40 %
			Terselenggaranya Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi Riau	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Masyarakat Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi Riau	100 %	100 %	100 %
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang	Fasilitasi Urusan Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Urusan Pertanahan	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan.	20 %	30 %	40 %

	Prima Berbasis Teknologi Informasi.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Berikut dijabarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Rencana Strategis Tahun 2017-2019.

Dinas PUPRPKPP PROV. Riau

**Tabel 2.3 (T-C.30.)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin		22,03%		17,81%	19,82%	22,03%	17,53%	19,49%	-	98,4%	98,3%	-
2	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi		30%		10%	20%	30%	8,36%	15,19 %	-	83,6%	75,95%	-
3	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		143 Ha		198 Ha	173 Ha	143 Ha	198 Ha	198 Ha	-	100%	0,00	-
4	PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan		108.000 m		30.500 M	37.000 M	40.500 M	114.916 M	11.031 M	-	376,77 %	29,81 %	-
5	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi		9 Dok		3	3	3	3	1	-	100 %	33,33 %	-
6	Persentase Rentang Waktu pelaksanaan Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah		100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-

Tolak ukur pencapaian sasaran kinerja pelayanan dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) pada tahun berjalan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang sudah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah sebelumnya (2017-2019). Dengan analisis capaian kinerja terhadap realisasi kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (*performa grip*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Indikator pertama, yaitu Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin dengan target pelaksanaan 19,82% dapat dilaksanakan dengan rasio capaian yang baik sampai dengan Tahun 2018. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan indikator ini antara lain yaitu peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk mendukung pemenuhan target indikator tersebut.

Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi memiliki realisasi capaian sebesar 15,19% dari target sebesar 20% yang sudah ditetapkan. Indikator ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan menunggu penetapan terbaru terhadap Kawasan Strategis Provinsi Riau pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang baru ditetapkan pada Tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Indikator yang ketiga yaitu Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. Pada tahun 2018 realisasi capaian untuk indikator ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga perangkat daerah diminta untuk dapat memangkas anggaran dan berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun pada Tahun 2019 ditargetkan penurunan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) sebesar 39 Ha.

Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu PSU Permukiman Pada Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan dengan target pencapaian sebesar 108.000 meter. Adapun capaian untuk target ini sudah dapat diselesaikan pada tahun pertama dengan realisasi capaian sebesar 368,56%. Walaupun demikian, dikarenakan pertumbuhan permukiman perkotaan yang cepat dan pesat serta besarnya permintaan dari masyarakat maka pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini tetap dilaksanakan sampai dengan Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas pendanaan Perangkat Daerah.

Indikator yang kelima, Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi dengan target 9 Dokumen. Adapun prioritas pelaksanaan pekerjaan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan untuk kepentingan umum, terutama dalam memfasilitasi

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis di Provinsi Riau. Disamping itu juga untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik Pertanahan lainnya.

Indikator yang terakhir yaitu Persentase Rentang Waktu Pelaksanaan Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ke-sekretariat-an antara lain : pengadministrasian umum, keuangan, aset, perencanaan program dan kedisiplinan pegawai.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis, survey, pendataan dan verifikasi data pembangunan serta monitoring kegiatan adalah upaya dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

#### **1. Tantangan dan Peluang Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman**

- 1) Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
- 2) Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan dan permukiman.
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Kelembagaan dan Kesadaran Para pelaku penyedia perumahan dan kawasan permukiman.
- 4) Pemenuhan target Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- 5) Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan kawasan Permukiman melalui Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi lokal bahan bangunan yang murah dan berkualitas.
- 6) Mendorong kemandirian Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
- 7) Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

## **2. Tantangan dan Peluang Bidang Pertanahan**

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang belum dapat dijadikan pedoman.
- 2) Sumber Daya manusia penyelenggara dan pengelola pertanahan belum memadai.
- 3) Standarisasi alokasi biaya pelaksanaan kegiatan fasilitasi, penyelenggaraan dan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum belum ditetapkan.
- 4) Terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dinas PUPRRPKPP PROV. Riau

**Tabel 2.4 (T-C.31.)  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>		10%	42.021.088.000,00	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>		10%	42.021.088.000,00	
	Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau yang disusun	Provinsi Riau	2 Dokumen	302.776.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau yang disusun	Provinsi Riau	2 Dokumen	302.776.000,00	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau yang Ditata dan Ditingkatkan Kualitasnya	Provinsi Riau	3 Kawasan	10.994.590.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau yang Ditata dan Ditingkatkan Kualitasnya	Provinsi Riau	3 Kawasan	10.994.590.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Perencanaan Teknis Pembangunan Peningkatan Prasarana Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman Kab/Kota	Provinsi Riau	2 Dokumen	862.420.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Peningkatan Prasarana Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman Kab/Kota	Provinsi Riau	2 Dokumen	862.420.000,00	
	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	4,500 Meter	7.443.530.000,00	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	4,500 Meter	7.443.530.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	192.500.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	192.500.000,00	
	Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Panjang Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	9,900 Meter	11.991.400.000,00	Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Panjang Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	9,900 Meter	11.991.400.000,00	
	Pembangunan/Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau	Jumlah SR yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	1,832 SR	10.233.872.000,00	Pembangunan/Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau	Jumlah SR yang Dibangun/Ditingkatkan	Provinsi Riau	1,832 SR	10.233.872.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni</b>		<b>45,66%</b>	<b>122.820.142.600,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni</b>		<b>45,66%</b>	<b>122.820.142.600,00</b>	
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana yang disediakan dan jumlah rumah bagi masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Difasilitasi	Provinsi Riau	40 Unit	2.450.790.000,00	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana yang disediakan dan jumlah rumah bagi masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Difasilitasi	Provinsi Riau	40 Unit	2.450.790.000,00	
	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I yang Dibangun	Wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Rokan hulu, Pelalawan, Inhu, Kuansing)	1,000 Unit	57.226.080.000,00	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I yang Dibangun	Wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Rokan hulu, Pelalawan, Inhu, Kuansing)	1,000 Unit	57.226.080.000,00	
	Pendataan/Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau	Jumlah laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Layak Huni Provinsi Riau	Provinsi Riau	2 Dokumen	543.660.000,00	Pendataan/Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau	Jumlah laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Layak Huni Provinsi Riau	Provinsi Riau	2 Dokumen	543.660.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja yang Dikelola	Provinsi Riau	1 Rusunawa	1.824.252.600,00	Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja yang Dikelola	Provinsi Riau	1 Rusunawa	1.824.252.600,00	
	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II yang Dibangun	Wilayah II (Siak, Meranti, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir)	1,000 Unit	60.775.360.000,00	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II yang Dibangun	Wilayah II (Siak, Meranti, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir)	1,000 Unit	60.775.360.000,00	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERTANAHAN</b>				<b>300.348.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERTANAHAN</b>				<b>300.348.000,00</b>	
	Perencanaan dan Pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.348.000,00	Perencanaan dan Pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.348.000,00	
	Penyelesaian Tanah Garapan Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Tanah Garapan	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyelesaian Tanah Garapan Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Tanah Garapan	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000,00	
					<b>165.141.578.600,00</b>					<b>165.141.578.600,00</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2020 telah melalui Rapat Koordinasi Teknis dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Perlunya penyelarasan dan sinergitas dalam perencanaan program/kegiatan antara Perangkat Daerah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dengan cara melakukan diskusi dan pembahasan rutin setiap tahunnya dalam wadah Rapat Koordinasi Teknis.
2. Pemerintah Pusat dan Provinsi harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kab/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pada Kawasan kumuh sesuai dengan kewenangannya serta terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi.
3. Perlu dibentuk/ditunjuk koordinator data di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengolah data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD).
4. Meningkatkan koordinasi antara Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah dalam hal pelayanan publik, pengelolaan TIK, pengelolaan database dan pengelolaan media center.

**Tabel 2.5 (T-C.32.)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Riau**

<b>Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau yang Ditata dan Ditingkatkan Kualitasnya	3 Kawasan	
2	Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	Panjang Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/ Ditingkatkan	12 Kabupaten/Kota	
3	Pembangunan /Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah SR yang Dibangun / Ditingkatkan	12 Kabupaten/Kota	
4	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau yang Dibangun/Ditingkatkan	12 Kabupaten/Kota	
5	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana yang disediakan dan jumlah rumah bagi masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Difasilitasi	Provinsi Riau	
6	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I	Wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Rokan hulu, Pelalawan, Inhu,	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I yang Dibangun	Wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Rokan hulu, Pelalawan, Inhu, Kuansing)	
7	Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II	Wilayah II (Siak, Meranti, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir)	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II yang Dibangun	Wilayah II (Siak, Meranti, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir)	
8	Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja yang Dikelola	Provinsi Riau	

# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGLATAN**

### **31. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Adapun Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

**A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan**

**1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah**

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

- 1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan.
- 2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan.

**B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna**

**mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.**

#### 1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

- 1) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- 2) Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu:

- 1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
- 2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
- 3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

#### 2. Penyediaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan.

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi

- 1) Pengendalian Perumahan Komersial,
- 2) Penguatan Perumahan Umum,
- 3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan
- 4) Fasilitas Perumahan Khusus.

### 3. Pembiayaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- 1) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- 2) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program:

- 1) Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan;



- 2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

### 32 Tujuan dan sasaran Renja PD 2019

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat
2.	Meningkatkan Penataan Kawasan Strategis dan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis

			Provinsi		Provinsi
			Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh	Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
3.	Meningkatkan Kualitas dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman Perkotaan di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Riau
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum	Percepatan Pelayanan Dalam Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum

### 33. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program dan kegiatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang
- b. Memperhatikan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2019 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian kembali terhadap proporsi kebutuhan pengelolaan Sumber Daya Perangkat daerah serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- b. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang harus diturunkan anggarannya untuk menyesuaikan ketersediaan Anggaran Kas Daerah seperti kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Program Pengembangan Perumahan
- c. Penambahan kegiatan untuk persiapan perencanaan untuk periode pelaksanaan pemerintahan yang baru yaitu penyusunan Rencana Kerja, (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**Provinsi Riau**

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	Program Pengembangan Perumahan	11	124,579,700,000.00
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	1,531,796,000.00
	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		2	11,527,591,100.00
Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	14	16,100,500,000.00
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2	621,401,000.00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	4,556,452,500.00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,590,100,000.00
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	100,000,000.00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	904,670,300.00
Total		7	53	161,512,210,900.00

Untuk program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Program Prioritas Sesuai Target RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	REALISASI S.D 2017	TARGET 2018	RENCANA 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan strategis yang ditingkatkan infrastrukturnya (kawasan)	Kawasan	7	3	1
2	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman Pedesaan (m')	Meter	40,000	-	-
3	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman Perkotaan (m')	Meter	114,161	37,000	40,500
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah sarana perumahan kawasan permukiman strategis yang diadakan (unit)	Unit	1,969	2,061	2,200
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah dokumen lingkungan sehat perumahan (dokumen)	Dokumen	1	-	-

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Dinas PUPRPKPP PROV. RIAU

**Tabel 4.1 (Tabel T-C.33.)  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Provinsi Riau**

Unit Organisasi : 1.01.04. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				131,730,922,800.00			170,675,100,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik</b>		100 Persen	4,556,452,500.00			3,895,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	12 bulan	1,020,000,000.00		12 bulan	1,200,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	350,000,000.00		12 Bulan	400,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	200,000,000.00		12 Bulan	200,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	150,000,000.00		12 Bulan	150,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman Dan Pertanahan	12 Bulan	100,000,000.00		12 Bulan	100,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.1.01.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Komputer 12 Unit, Printer 5 Unit, Kursi Kerja 71 Unit, Kursi Rapat 36 Unit, Meja Rapat 6 Unit, Meja Kerja 71 Unit, Sofa Tamu 6 Set, Filling Kabinet 24 unit, Lemari Kerja 21 Unit, Televisi 3 Unit, Drone 1 Unit, CCTV 16 Chanel, Hummer Test 2 Unit, Core Drill 2 unit, Plotter 1 Unit.	1,287,368,500.00		Komputer 12 Unit, Printer 5 Unit, Kursi Kerja 71 Unit, Kursi Rapat 36 Unit, Meja Rapat 6 Unit, Meja Kerja 71 Unit, Sofa Tamu 6 Set, Filling Kabinet 24 unit, Lemari Kerja 21 Unit, Televisi 3 Unit, Drone 1 Unit, CCTV 16 Chanel, Hummer Test 2 Unit, Core Drill 2 unit, Plotter 1 Unit.	500,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	55,000,000.00		12 Bulan	55,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5300 Porsi	100,000,000.00		5300 Porsi	100,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kemanan Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 bulan	201,600,000.00		12 bulan	250,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.022.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	80,000,000.00		12 Bulan	100,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yang diikuti	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Pameran	50,000,000.00		1 Pameran	120,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.01.144.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50 Kali	712,484,000.00		50 Kali	700,000,000.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.1.01.04.01.01.308.	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	20 Orang	250,000,000.00		20 Orang	20,000,000.00
<b>1.01.04.1.01.04.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1,590,100,000.00</b>			<b>1,500,100,000.00</b>
1.01.04.1.01.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang Dipelihara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	450,000,000.00		15 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	400,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	110 unit	100,100,000.00		110 unit	100,100,000.00
1.01.04.1.01.04.01.02.043.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.305 m2	1,000,000,000.00		1.305 m2	1,000,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.02.199.	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah Sarana Kearsipan Yang disediakan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit, Filling Kabinet 2 unit, Lemari Besi 2	40,000,000.00		Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit, Filling Kabinet 2 unit, Lemari Besi 2 Unit	-
<b>1.01.04.1.01.04.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100,000,000.00</b>			<b>100,000,000.00</b>
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang Waktu Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Bulan	100,000,000.00		12 Bulan	100,000,000.00
<b>1.01.04.1.01.04.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketepatan penyampaian laporan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>904,670,300.00</b>			<b>780,000,000.00</b>
1.01.04.1.01.04.01.06.005.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	50,000,000.00		1 Dokumen	250,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.06.021.	Pendataan barang milik daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan Inventaris Barang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	170,000,000.00		1 Dokumen	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.1.01.04.01.06.027.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang Disusun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	50,000,000.00		1 Dokumen	-
1.01.04.1.01.04.01.06.120.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5 Dokumen	280,000,000.00		5 Dokumen	280,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.06.122.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Disusun	12 Kabupaten/Kota	22 kali	354,670,300.00		22 kali	250,000,000.00
<b>1.01.04.1.01.04.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Jumlah sarana perumahan kawasan permukiman strategis yang diadakan</b>		<b>2.200 Unit</b>	<b>124,579,700,000.00</b>			<b>164,400,000,000.00</b>
1.01.04.1.01.04.01.15.034.	Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau	Jumlah Laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	1,192,909,000.00		1 Dokumen	1,500,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.036.	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1 yang Dibangun	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu	500 Unit	27,500,000,000.00		500 Unit	36,000,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.037.	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2 yang Dibangun	Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi	500 Unit	28,750,000,000.00		500 Unit	36,000,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.038.	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3 yang Dibangun	Kabupaten Siak, kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir	500 Unit	30,000,000,000.00		500 Unit	42,000,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.039.	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4 yang Dibangun	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir	500 Unit	30,000,000,000.00		500 Unit	42,000,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.040.	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 1	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	800,000,000.00		1 Dokumen	1,200,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.041.	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 2	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 2	Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi	1 Dokumen	900,000,000.00		1 Dokumen	1,200,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.1.01.04.01.15.042.	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 3	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 3	Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	950,000,000.00		1 Dokumen	1,500,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.043.	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 4	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat layak Huni(RSLH) Provinsi	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir	1 Dokumen	950,000,000.00		1 Dokumen	1,500,000,000.00
1.01.04.1.01.04.01.15.052.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kaw asan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen RP3KP Provinsi Riau yang disusun	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	2,429,700,000.00		1 Dokumen	-
1.01.04.1.01.04.01.15.053.	Pengelolaan Rusunaw a Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Rusunaw a Provinsi Riau yang dikelola	Dinas Perumahan Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	1 Rusunaw a	1,107,091,000.00		1 Rusunaw a	1,500,000,000.00
<b>1.01.03.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG</b>				<b>29,781,288,100.00</b>			<b>103,700,000,000.00</b>
<b>1.01.03.1.01.04.01.29.</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Jumlah Kawasan Strategis Yang Ditingkatkan Infrastrukturnya</b>		<b>1 Kawasan</b>	<b>13,680,788,100.00</b>			<b>25,200,000,000.00</b>
1.01.03.1.01.04.01.29.005.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kaw asan Kumuh Provinsi Riau	Jumlah Kaw asan Kumuh Yang Ditata/Ditingkatkan Kualitas Infrastrukturnya	Provinsi Riau	6 Kaw asan	10,446,431,100.00		6 Kaw asan	25,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.29.019.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kaw asan Strategis Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman pada Kaw asan Strategis Provinsi Riau	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	3 Dokumen	1,531,796,000.00		3 Dokumen	-
1.01.03.1.01.04.01.29.039.	Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kaw asan Kumuh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Provinsi Riau Yang Disusun	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	5 Dokumen	1,081,160,000.00		5 Dokumen	-
1.01.03.1.01.04.01.29.051.	Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum di Provinsi Riau	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	1 Dokumen	298,644,900.00		1 Dokumen	100,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.29.052.	Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Konflik Pertanahan yang disusun	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	1 Dokumen	322,756,100.00		1 Dokumen	100,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.04.01.32.	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</b>	<b>Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman perkotaan</b>		<b>40.500 M</b>	<b>16,100,500,000.00</b>			<b>78,500,000,000.00</b>
1.01.03.1.01.04.01.32.070.	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Kota Pekanbaru	Panjang Jalan Lingkungan di Kota Pekanbaru yang dibangun/ditingkatkan	Kota Pekanbaru	757 Meter	1,100,000,000.00		757 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.071.	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Kota Dumai	Panjang Jalan Lingkungan di Kota Dumai yang dibangun/ditingkatkan	Kota Dumai	703 Meter	1,100,000,000.00		703 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.082.	Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Provinsi Riau Yang Disusun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12 Dokumen	2,200,000,000.00		12 Dokumen	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.083.	Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau	Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau	Provinsi Riau	22 kali	200,000,000.00		22 kali	500,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.086.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir yang dibangun/ditingkatkan	Rokan Hilir	1052 Meter	1,600,500,000.00		1052 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.087.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang	Kabupaten Kepulauan Meranti	601 Meter	1,100,000,000.00		601 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.088.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Bengkalis	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Bengkalis	602 Meter	1,100,000,000.00		602 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.089.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Siak	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Siak yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Siak	705 Meter	1,100,000,000.00		705 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.090.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Pelalawan	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Pelalawan yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Pelalawan	705 Meter	1,100,000,000.00		705 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.091.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Kuantan Singingi	704 Meter	1,100,000,000.00		704 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.092.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Indragiri Hulu	702 Meter	1,100,000,000.00		702 Meter	6,000,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.01.04.01.32.093.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Yang Dibangun/Ditingkatkan	Kabupaten Indragiri Hilir	604 Meter	1,100,000,000.00		604 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.094.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kampar	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Kampar yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Kampar	705 Meter	1,100,000,000.00		705 Meter	6,000,000,000.00
1.01.03.1.01.04.01.32.095.	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Rokan Hulu	702 Meter	1,100,000,000.00		702 Meter	6,000,000,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>161,512,210,900.00</b>			<b>274,375,100,000.00</b>

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun berdasarkan dengan ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pemegang kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, selain itu Rancangan Akhir Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Rancangan Akhir RENJA juga dapat memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 ini.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

**Ir. MUHAMAD AMIN, M.Eng**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670619 199402 1 001